



Budaya Politik Masyarakat Kampung Adat Urug Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor pada Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018

Muhamad Nurul Firdaus

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email Korespondensi: muhamadnurulfirdaus25@gmail.com

Diterima: 22-03-2026 | Disetujui: 02-04-2026 | Diterbitkan: 04-04-2026

ABSTRACT

The Regional Head Election (Pilkada) represents a concrete manifestation of democratic practice at the local level. However, within indigenous communities, political participation is not solely shaped by formal democratic mechanisms but is also strongly influenced by cultural values passed down through generations. Kampung Adat Urug, located in Sukajaya District, Bogor Regency, is an indigenous community that continues to strongly preserve its social system and customary norms. This condition gives rise to political practices with distinctive characteristics compared to those of modern societies in general. This study aims to analyze the political culture of the Kampung Adat Urug community in the 2018 Bogor Regent Election, focusing on political orientation, patterns of participation, and the role of customary leaders in the local political process. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders and cultural practitioners, as well as documentation studies of relevant sources. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The analytical framework for political culture refers to the theory of Gabriel A. Almond and Sidney Verba. The findings indicate that the political culture of the Kampung Adat Urug community is characterized by a parochial-subject orientation with a tendency toward traditional participatory practices. Customary values such as deliberation, mutual cooperation, and respect for customary leaders are dominant factors shaping the community's political orientation and behavior. Political participation remains active but is framed by customary principles that emphasize social harmony and reject transactional political practices. The political culture of the Kampung Adat Urug community reflects a synthesis between the modern democratic system and enduring local values that are preserved and upheld.

Keywords: *political culture, indigenous community, Pilkada, Kampung Adat Urug, political participation*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata praktik demokrasi di tingkat lokal. Namun, dalam konteks masyarakat adat, partisipasi politik tidak semata-mata dipengaruhi oleh mekanisme demokrasi formal, melainkan juga oleh nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, merupakan komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem sosial dan norma adat secara kuat. Kondisi ini menjadikan praktik politik masyarakatnya memiliki karakteristik yang khas dibandingkan masyarakat modern pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug pada Pemilihan Bupati Bogor tahun 2018, dengan menitikberatkan pada orientasi politik, pola partisipasi, serta peran tokoh adat dalam proses politik lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan budayawan, serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber relevan. Teknik analisis data menggunakan model

interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis budaya politik merujuk pada teori Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug bercorak parokial-subjek dengan kecenderungan partisipatif tradisional. Nilai-nilai adat seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh adat menjadi faktor dominan dalam membentuk orientasi dan perilaku politik masyarakat. Partisipasi politik tetap berlangsung secara aktif, namun dibingkai oleh prinsip adat yang menekankan harmoni sosial serta menolak praktik politik transaksional. Budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug mencerminkan adanya sintesis antara sistem demokrasi modern dengan nilai-nilai lokal yang masih hidup dan dijaga.

Kata kunci: budaya politik, masyarakat adat, Pilkada, Kampung Adat Urug, partisipasi politik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Firdaus, M. N. (2026). Budaya Politik Masyarakat Kampung Adat Urug Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor pada Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1104-1116. <https://doi.org/10.63822/6jxeyj54>

PENDAHULUAN

Pendahuluan Demokrasi lokal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman sosial dan budaya masyarakatnya. Salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi tersebut adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah. Namun demikian, praktik demokrasi tidak selalu berjalan dalam pola yang seragam. Pada masyarakat adat, proses politik sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, memahami budaya politik masyarakat adat menjadi penting untuk melihat bagaimana demokrasi lokal dijalankan dalam konteks sosial yang khas.

Kampung Adat Urug yang terletak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang hingga kini masih mempertahankan tradisi dan sistem nilai lokal. Masyarakat Kampung Adat Urug hidup dalam tatanan sosial yang berlandaskan adat istiadat, kekerabatan, serta kepemimpinan tokoh adat yang memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memandang dan berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada.

Pada Pemilihan Bupati Bogor tahun 2018, masyarakat Kampung Adat Urug turut terlibat dalam dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai kepentingan politik. Partisipasi mereka dalam Pilkada tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan rasional modern, seperti pertimbangan program kerja atau visi-misi kandidat. Sebaliknya, keputusan politik masyarakat adat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, seperti musyawarah kolektif, arahan tokoh adat, serta pertimbangan menjaga harmoni sosial di dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat adat memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat urban yang lebih individualistis.

Konsep budaya politik menjadi penting dalam menjelaskan fenomena tersebut. Almond dan Verba memaknai budaya politik sebagai orientasi sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap sistem politik dan peran mereka di dalamnya. Dalam konteks masyarakat adat, orientasi politik sering kali bersifat parokial atau subjek, namun tetap membuka ruang partisipasi dalam batas-batas nilai tradisional yang dianut. Dengan demikian, budaya politik masyarakat adat tidak dapat dikategorikan secara hitam-putih, melainkan sebagai bentuk budaya politik campuran yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Modernisasi dan penetrasi informasi politik melalui media massa dan media digital turut memberikan pengaruh terhadap masyarakat adat, termasuk Kampung Adat Urug. Generasi muda mulai mengenal sistem politik modern dan memiliki akses terhadap informasi politik yang lebih luas. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran nilai adat dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan politik. Justru, terjadi proses negosiasi antara nilai tradisional dan sistem demokrasi modern yang membentuk pola budaya politik yang khas.

Kajian mengenai budaya politik masyarakat adat masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Pilkada di tingkat lokal. Padahal, masyarakat adat merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia yang plural. Kurangnya pemahaman terhadap budaya politik masyarakat adat berpotensi menimbulkan kebijakan publik yang tidak sensitif terhadap kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug dijalankan dalam Pilkada Bupati Bogor tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug dengan menyoroti orientasi politik masyarakat, pola partisipasi politik,

*Budaya Politik Masyarakat Kampung Adat Urug Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor
pada Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018*

(Firdaus)

serta peran tokoh adat dalam proses Pilkada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya dalam studi budaya politik dan demokrasi lokal, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terhadap masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug dalam Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka-angka statistik, melainkan pada makna, nilai, dan proses sosial yang membentuk perilaku politik masyarakat adat. Desain penelitian ini bersifat studi kasus (case study), yaitu menelaah secara mendalam satu komunitas tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Urug yang terletak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena Kampung Adat Urug merupakan komunitas masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosial dan politiknya, sehingga relevan untuk mengkaji interaksi antara budaya lokal dan sistem demokrasi modern.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Adat Urug yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka tidak digunakan sampel dalam pengertian statistik, melainkan informan penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan snowball sampling, yaitu teknik penentuan informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Adat Kampung Adat Urug dan Budayawan Kampung Adat Urug yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai budaya politik masyarakat setempat.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta observasi lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan Pilkada, buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan dalam merancang pertanyaan, melakukan wawancara, mengamati situasi lapangan, serta menganalisis data. Selain itu, digunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai instrumen pendukung untuk menjaga

konsistensi pertanyaan yang diajukan kepada informan. Alat bantu seperti alat perekam suara dan dokumentasi foto juga digunakan untuk mendukung kelengkapan data.

Pendekatan Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data, yakni proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian serta melakukan pengecekan ulang terhadap data untuk memastikan keabsahannya.

Teknik Analisis dan Pengujian Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka tidak digunakan teknik pengujian statistik. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Selain itu, dilakukan juga pengecekan ulang (member check) kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pernyataan narasumber.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug serta bagaimana nilai-nilai adat memengaruhi orientasi dan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Struktur Adat Kampung Adat Urug

Kampung Adat Urug merupakan komunitas masyarakat adat yang memiliki struktur sosial dan organisasi adat yang masih berfungsi secara aktif. Permukiman Kampung Urug terbagi ke dalam beberapa wilayah, yaitu Urug Atas, Urug Tengah, dan Urug Bawah. Pembagian wilayah ini tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga mencerminkan struktur kepemimpinan adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Kepemimpinan adat di Kampung Urug dipusatkan pada tokoh adat yang memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Tokoh adat berperan sebagai pemimpin budaya, penasehat sosial, serta penjaga nilai-nilai adat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih banyak merujuk pada keputusan tokoh adat dibandingkan pada otoritas formal negara, terutama dalam persoalan sosial dan budaya.

Orientasi Politik Masyarakat Kampung Adat Urug

Orientasi politik masyarakat Kampung Adat Urug dipengaruhi secara kuat oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dari sisi orientasi kognitif, pemahaman masyarakat terhadap sistem politik formal relatif terbatas. Sebagian besar masyarakat mengenal politik melalui informasi yang disampaikan oleh tokoh adat atau melalui forum musyawarah adat.

Dari sisi orientasi afektif, masyarakat memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap tokoh adat. Tokoh adat dipandang sebagai figur yang memiliki kebijaksanaan dan mampu menjaga keseimbangan sosial. Keterikatan ini berpengaruh terhadap sikap politik masyarakat, di mana arahan tokoh adat menjadi rujukan utama dalam menentukan pilihan politik.

Sementara itu, orientasi evaluatif masyarakat didasarkan pada norma adat dan etika sosial. Masyarakat menilai proses politik sebagai sesuatu yang baik apabila tidak menimbulkan konflik dan mampu menjaga harmoni sosial. Praktik politik yang bersifat transaksional, seperti politik uang, dipandang bertentangan dengan nilai adat dan cenderung ditolak oleh masyarakat.

Pola Partisipasi Politik dalam Pilkada Bupati Bogor 2018

Partisipasi politik masyarakat Kampung Adat Urug dalam Pilkada Bupati Bogor tahun 2018 tetap berlangsung secara aktif. Masyarakat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi formal dalam sistem demokrasi. Namun, partisipasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh proses musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan perwakilan masyarakat.

Musyawarah adat menjadi mekanisme utama dalam menentukan sikap politik kolektif masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, tokoh adat memberikan pandangan dan pertimbangan mengenai calon pemimpin yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan kampung. Meskipun tidak bersifat memaksa, sebagian besar masyarakat mengikuti arahan tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas adat.

Peran Tokoh Adat dalam Proses Politik Lokal

Tokoh adat memiliki peran sentral dalam proses politik lokal di Kampung Adat Urug. Selain sebagai penasihat moral, tokoh adat juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem politik formal. Tokoh adat berupaya memastikan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan tidak merusak keharmonisan sosial.

Dalam konteks Pilkada 2018, tokoh adat tidak terlibat secara langsung dalam kampanye politik. Namun, melalui musyawarah dan komunikasi informal, tokoh adat memberikan arahan normatif kepada masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa tokoh adat bukan aktor politik praktis, melainkan aktor kultural yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik masyarakat.

Budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug pada Pemilihan Bupati Bogor tahun 2018 menunjukkan adanya pola yang khas dan berbeda dari masyarakat modern pada umumnya. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik politik masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tradisional yang masih hidup dan dijaga secara kolektif. Budaya politik yang berkembang merupakan hasil interaksi antara sistem demokrasi modern dengan struktur sosial adat yang telah mengakar kuat.

Berdasarkan kerangka teori Almond dan Verba, budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug dapat dikategorikan sebagai budaya politik parokial-subjek dengan kecenderungan partisipatif tradisional. Unsur parokial terlihat dari keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap sistem politik formal dan lembaga-lembaga negara. Masyarakat tidak secara aktif mengikuti perkembangan politik melalui media massa atau kanal resmi, melainkan memperoleh informasi politik melalui tokoh adat dan mekanisme informal. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat adat yang lebih menekankan hubungan sosial langsung dibandingkan interaksi dengan sistem politik abstrak.

*Budaya Politik Masyarakat Kampung Adat Urug Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor
pada Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018*

(Firdaus)

Namun demikian, budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug tidak sepenuhnya bersifat pasif. Unsur budaya politik subjek dan partisipan tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam Pilkada sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem politik negara sekaligus partisipasi dalam proses demokrasi. Masyarakat menyadari adanya kewajiban sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilih, meskipun orientasi politik mereka lebih banyak dipengaruhi oleh nilai adat dibandingkan pertimbangan rasional modern.

Peran tokoh adat menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya politik masyarakat. Tokoh adat memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat, sehingga pandangan dan arahan yang disampaikan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap politik masyarakat. Dalam konteks Pilkada 2018, tokoh adat berfungsi sebagai penengah yang memastikan bahwa proses politik tidak menimbulkan konflik sosial dan tetap berada dalam koridor nilai adat. Pola ini menunjukkan bahwa otoritas adat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam praktik demokrasi lokal.

Musyawarah adat sebagai sarana pengambilan keputusan kolektif mencerminkan bentuk partisipasi politik yang khas. Partisipasi tidak dipahami sebagai ekspresi individual semata, melainkan sebagai proses kolektif yang menekankan konsensus dan keharmonisan sosial. Pola ini berbeda dengan konsep partisipasi politik liberal yang menekankan kebebasan individual, namun tetap memiliki legitimasi dalam konteks budaya lokal. Dengan demikian, demokrasi lokal di Kampung Adat Urug berjalan dalam bentuk yang kontekstual dan berakar pada kearifan lokal.

Penolakan terhadap praktik politik transaksional, seperti politik uang, menunjukkan adanya dimensi etika dalam budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug. Nilai adat berfungsi sebagai filter moral yang membatasi masuknya praktik politik yang dianggap merusak tatanan sosial. Temuan ini memperkuat argumen bahwa budaya politik masyarakat adat dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug memperlihatkan adanya proses adaptasi terhadap sistem politik modern tanpa kehilangan identitas budaya. Masyarakat adat tidak bersifat anti terhadap demokrasi, namun menjalankan demokrasi sesuai dengan nilai dan norma yang mereka anut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralitas budaya politik merupakan realitas yang perlu diakomodasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Selain itu, budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu identik dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas politik formal seperti kampanye atau diskusi publik modern. Partisipasi politik dalam konteks masyarakat adat lebih banyak diwujudkan melalui mekanisme tradisional yang berbasis musyawarah dan kesepakatan kolektif. Pola ini mencerminkan bentuk partisipasi politik yang bersifat komunal, di mana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan individual. Dengan demikian, rendahnya ekspresi politik individual tidak dapat serta-merta diartikan sebagai apatisisme politik.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa budaya politik masyarakat adat memiliki rasionalitasnya sendiri. Keputusan politik yang diambil berdasarkan arahan tokoh adat dan musyawarah bersama bukan merupakan bentuk ketergantungan pasif, melainkan strategi sosial untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan komunitas. Dalam masyarakat adat, konflik politik dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sosial, sehingga proses politik diarahkan untuk meminimalkan potensi perpecahan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial menjadi parameter utama dalam menilai praktik politik.

Dari perspektif demokrasi lokal, kondisi ini menantang pandangan normatif yang mengukur kualitas demokrasi semata-mata berdasarkan tingkat partisipasi individual dan kompetisi politik terbuka. Demokrasi di Kampung Adat Urug dijalankan dalam kerangka nilai lokal yang menekankan konsensus dan kebersamaan. Praktik demokrasi semacam ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif, selama masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan konteks sosialnya.

Modernisasi politik dan masuknya sistem pemilu langsung juga membawa perubahan gradual terhadap budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug. Generasi muda mulai menunjukkan peningkatan ketertarikan terhadap isu-isu politik dan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi politik melalui media digital. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menggeser peran tokoh adat. Sebaliknya, terjadi proses adaptasi di mana tokoh adat tetap menjadi rujukan utama, sementara informasi modern menjadi pelengkap dalam pengambilan keputusan politik.

Lebih lanjut, peran tokoh adat sebagai aktor kultural dalam politik lokal menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersumber dari jabatan formal. Legitimasi tokoh adat bersifat simbolik dan normatif, namun memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap perilaku politik masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa analisis politik lokal perlu memperhatikan aktor-aktor non-formal yang sering kali memiliki peran lebih signifikan dibandingkan aktor politik formal.

Dengan demikian, budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug dapat dipahami sebagai bentuk budaya politik hibrida, yaitu perpaduan antara nilai tradisional dan mekanisme demokrasi modern. Hibriditas ini memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam sistem politik negara tanpa harus meninggalkan identitas budayanya. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian budaya politik di Indonesia yang selama ini cenderung berfokus pada masyarakat urban dan modern.

Implikasi Temuan Penelitian terhadap Kebijakan Politik dan Penyelenggaraan Pemilu di Masyarakat Adat

Temuan penelitian mengenai budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug memiliki implikasi penting terhadap perumusan kebijakan politik dan penyelenggaraan pemilu di wilayah masyarakat adat. Praktik politik yang berlandaskan nilai adat menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat seragam dan administratif belum tentu efektif diterapkan pada komunitas adat. Oleh karena itu, negara perlu memahami bahwa partisipasi politik masyarakat adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat non-adat, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran tokoh adat sebagai mitra strategis bagi penyelenggara pemilu. Tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mampu menjembatani komunikasi antara negara dan masyarakat adat. Keterlibatan tokoh adat dalam sosialisasi pemilu, meskipun tidak bersifat politis, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi formal tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.

Selain itu, temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat adat perlu dirancang secara sensitif terhadap budaya lokal. Pendidikan politik tidak cukup hanya menekankan aspek prosedural, seperti tata cara memilih atau hak dan kewajiban pemilih, tetapi juga harus menghargai mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif yang telah lama dipraktikkan. Pendekatan

partisipatif berbasis komunitas dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan individualistik dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat adat.

Lebih jauh, implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan negara terhadap keberagaman budaya politik di Indonesia. Demokrasi tidak seharusnya dipaksakan dalam satu model tunggal, melainkan perlu memberikan ruang bagi praktik-praktik lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif. Dengan mengakomodasi nilai adat dalam kebijakan politik dan pemilu, negara tidak hanya memperkuat legitimasi demokrasi lokal, tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat.

Politik Identitas dan Kesadaran Masyarakat Komunal

Identitas sebagai masyarakat adat memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik kolektif masyarakat Kampung Adat Urug. Identitas tersebut tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun solidaritas sosial. Dalam praktik politik, identitas adat berfungsi sebagai perekat yang menjaga kesatuan sikap masyarakat agar tidak terpecah oleh perbedaan pilihan politik yang bersifat individual.

Kesadaran komunal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan kesepakatan bersama dibandingkan ekspresi politik personal. Pilihan politik tidak diumumkan secara terbuka dan tidak diperdebatkan secara konfrontatif. Masyarakat lebih memilih mengikuti keputusan kolektif hasil musyawarah adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kebersamaan dan harmoni sosial yang telah lama dijaga.

Politik identitas dalam masyarakat Kampung Adat Urug juga tidak dimaknai secara eksklusif atau antagonistik. Identitas adat tidak digunakan untuk menolak sistem politik nasional, melainkan sebagai landasan etis dalam menyaring pengaruh politik eksternal. Kandidat kepala daerah dinilai bukan hanya dari visi dan program, tetapi juga dari sikap dan penghormatan mereka terhadap adat serta kearifan lokal.

Dengan demikian, identitas adat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam praktik politik. Kesadaran komunal yang kuat mencegah munculnya konflik politik terbuka dan menjaga stabilitas sosial di tengah kontestasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas dalam masyarakat adat dapat berfungsi secara konstruktif apabila dikelola dalam kerangka nilai kolektif.

Implikasi Budaya Politik Adat terhadap Kualitas Demokrasi Lokal

Budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug memberikan implikasi yang signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal. Demokrasi tidak hanya dijalankan sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang berlandaskan nilai etika dan kebersamaan. Nilai adat berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku politik masyarakat agar tetap berada dalam koridor yang dapat diterima secara sosial.

Partisipasi politik yang berkembang tidak berorientasi pada kompetisi yang tajam antarindividu, melainkan pada konsensus dan kesepakatan kolektif. Pola ini memang berbeda dengan model demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individual secara penuh. Namun, dalam konteks masyarakat adat, pola tersebut justru berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik horizontal.

Budaya musyawarah yang kuat juga memperkaya makna partisipasi politik. Partisipasi tidak diukur dari seberapa sering masyarakat terlibat dalam kampanye atau diskusi politik formal, melainkan dari

keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, demokrasi lokal di Kampung Adat Urug memiliki dimensi substantif yang berakar pada praktik sosial sehari-hari.

Implikasi ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dinilai secara tunggal berdasarkan indikator modern semata. Pengalaman Kampung Adat Urug memperlihatkan bahwa demokrasi dapat berjalan efektif apabila mampu beradaptasi dengan struktur sosial dan budaya setempat. Budaya politik adat justru dapat menjadi modal sosial yang memperkuat demokrasi lokal.

Tantangan Keberlanjutan Budaya Politik Adat di Era Modern

Meskipun budaya politik adat masih berfungsi secara kuat, keberlanjutannya menghadapi berbagai tantangan di era modern. Perubahan sosial, meningkatnya mobilitas penduduk, serta penetrasi teknologi informasi membawa pola pikir baru yang berpotensi menggeser orientasi politik masyarakat, khususnya generasi muda. Akses terhadap media sosial memperkenalkan wacana politik yang lebih beragam dan individualistik.

Generasi muda Kampung Adat Urug mulai menunjukkan ketertarikan terhadap isu politik yang bersifat nasional dan global. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam relasi antara nilai adat dan pandangan politik modern. Namun, ketertarikan tersebut tidak serta-merta menimbulkan konflik dengan adat, melainkan membuka ruang dialog antar generasi mengenai cara memaknai politik secara kontekstual.

Dalam banyak kasus, nilai adat tetap dijadikan rujukan utama, sementara informasi modern berfungsi sebagai pelengkap dalam pengambilan keputusan politik. Tokoh adat mulai beradaptasi dengan perubahan ini dengan memberikan ruang diskusi yang lebih terbuka tanpa meninggalkan prinsip dasar adat. Proses ini menunjukkan bahwa budaya politik adat memiliki kapasitas untuk bertransformasi secara gradual.

Dengan demikian, tantangan modernisasi tidak selalu berujung pada erosi budaya politik adat. Sebaliknya, tantangan tersebut dapat menjadi momentum bagi penguatan budaya politik yang lebih reflektif dan adaptif. Keberlanjutan budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug bergantung pada kemampuan komunitas dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug pada Pemilihan Bupati Bogor tahun 2018 memiliki karakteristik yang khas. Budaya politik yang berkembang bercorak parokial-subjek dengan kecenderungan partisipatif tradisional. Orientasi politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh nilai adat, musyawarah kolektif, serta peran tokoh adat dibandingkan oleh pertimbangan politik rasional modern.

Partisipasi politik masyarakat tetap berlangsung secara aktif melalui penggunaan hak pilih dalam Pilkada. Namun, partisipasi tersebut dibingkai oleh prinsip adat yang menekankan harmoni sosial dan konsensus. Tokoh adat memainkan peran sentral sebagai penjaga nilai dan pengarah normatif dalam proses politik lokal. Praktik politik yang bertentangan dengan nilai adat, seperti politik uang, cenderung ditolak oleh masyarakat.

Budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug menunjukkan bahwa demokrasi lokal dapat berjalan secara efektif apabila mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya setempat. Integrasi antara

sistem demokrasi modern dan nilai adat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kampung Adat Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, yang telah bersedia menerima penulis serta memberikan informasi dan pengalaman yang sangat berharga selama proses pengumpulan data penelitian.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh adat dan informan penelitian yang dengan keterbukaan dan kebijaksanaannya telah membantu penulis memahami dinamika sosial, budaya, dan politik yang berkembang di lingkungan masyarakat adat. Kontribusi pemikiran dan pengalaman para informan menjadi bagian penting dalam memperkaya analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak akademik, khususnya dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat, yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik konstruktif selama proses penyusunan penelitian dan penulisan artikel ini. Masukan tersebut sangat membantu dalam meningkatkan kualitas substansi dan sistematika penulisan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan kajian di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian budaya politik dan demokrasi lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (2001). *Comparative politics today: A world view*. New York: Longman.
- Adi Sucipto. (2015). Budaya politik lokal dan partisipasi politik masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014. *4*(1), 35.
- Akhmad Satori, Widiastuti, W., & Gunawan, H. (2013). Budaya politik masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, *2*(1), 185–208.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.
- Debhy, W. (2021). Strategi kampanye sosial pada Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 melalui platform media sosial Facebook. *Journal of Politic and Government Studies*, *11*(1).
- Dewantara, A. (n.d.). Peran elit masyarakat: Studi keberlanjutan adat istiadat di Kampung Adat Urug Bogor. *Jurnal Al-Turas*, *19*(1).
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.

- Faisal, R. (2013). *Budaya politik masyarakat adat Kampung Naga (Studi kasus di masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Henry & Yasmine. (n.d.). *Masyarakat hukum adat di Indonesia (Bab IV)*. Universitas Esa Unggul.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kambo, G. A. (2025). Kekuatan politik pemangku adat Ammatoa pada masyarakat adat di Tanatua Bulukumba. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 45–60.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komara, Ade Eka. (2024). Wawancara mengenai budaya politik masyarakat Kampung Adat Urug dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2018. Wawancara pribadi, Kampung Adat Urug, 1–3 April 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. (2018). *Laporan Pilkada Kabupaten Bogor 2018*.
- Lastari, A. (2018). *Budaya politik masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (n.d.). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, I. (2019). Pengaruh globalisasi terhadap komunitas adat di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 6(1).
- Nurainun, N., Siregar, S. B., Tamba, R., & Sulvina, A. (2024). Budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 di Desa Sambirejo Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 1123–1135.
- Populix. (n.d.). *Snowball sampling: Definisi, jenis, dan contoh*. Populix. <https://info.populix.co/articles/snowball-sampling-adalah/>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Ratna, N. K. (2018). Komunikasi tradisional dalam politik lokal: Studi pada masyarakat adat. *Jurnal Komunikasi*, 9(2).
- Rochadi, A. S., Fawzia, D., & Razuni, G. (2024). Mobilization and control: Ethnic political in local parliament members election in Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 16(1), 85–98.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryanjari, E., & Suhanto. (2023). Political participation in traditional society: Case study of legislative election in Kanekes Village. *Journal of Social Political Sciences*, 4(2), 134–148.
- Syafie, I. K. (2011). *Sistem politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tamma, S., Duile, T. M., & Daud, R. (2020). Adat as a local ideology of indigenous people in political event. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 199–214.

- Ukat, Abah. (2024). *Wawancara mengenai peran tokoh adat dalam membentuk partisipasi politik masyarakat Kampung Adat Urug pada Pilkada Kabupaten Bogor 2018*. Wawancara pribadi, Kampung Adat Urug, 28 & 30 Maret 2024.
- UMSU. (2023). Budaya politik di Indonesia. <https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Universitas Negeri Jakarta. (n.d.). *BAB 1* [PDF]. Repository UNJ. <https://repository.unj.ac.id/13008/2/BAB%201.pdf>
- Wardhanie, A. A. (2016). Budaya politik masyarakat dalam Pilkada langsung tahun 2015 di Desa Kebadongan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 45–59.
- Wardhanie, A. A. (2017). *Budaya politik masyarakat Desa Kebadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada langsung tahun 2015*. Universitas Negeri Semarang.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.
- Widodo, J. (2015). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi lokal: Perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik*. Yogyakarta: Ombak.